

LKJ

LAPORAN KINERJA TAHUN

2017



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAINAN, JANUARI 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 telah dapat diselesaikan.

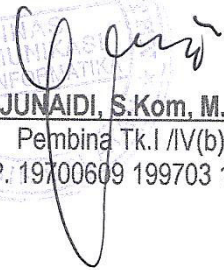
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan komunikasi dan informatika pada tahun 2017 dan merupakan tahun pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021.

Program/kegiatan-kegiatan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan selama tahun 2017 adalah upaya peningkatan pendapatan dan terciptanya komunikasi dan informatika secara umum mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat pelaksanaan beberapa program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan, hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan, serta melakukan perbaikan dan penajaman Renstra, Program dan Kegiatan pada periode 2016-2021 kedepan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Januari 2018

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan


JUNAIDI, S.Kom, M.E
Pembina Tk.I /IV(b)

NIP. 19700609 199703 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"***

Pada tahun 2017 ada dua belas sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional
 2. Pengembangan Sistem Layanan Pemerintahan secara elektronik
 3. Penyediaan sarana prasarana jaringan
 4. Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan melalui aplikasi e-government pada layanan publik
 5. Pengembangan Sistem Aplikasi Informatika yang terintegrasi
 6. Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat
 7. Meningkatkan Pengolahan informasi dan Dokumentasi melalui peningkatan layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website
 8. Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik
 9. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi secara mandiri
 10. Meningkatkan peran lembaga komunikasi dan kemitraan media dalam penyebaran informasi.
 11. Penyediaan jaringan komunikasi data antar perangkat daerah melalui media Fiber Optick (FO).
 12. Melaksanakan pengamanan informasi dan data pemerintah daerah.
1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut :



A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan meubiler
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6. Rehab gedung kantor
7. Pembangunan Media Center
8. Pembangunan Command Center
9. Pembangunan Ruang Server
10. Pembangunan studio radio langkisau

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Pendidikan Sandiman



D. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1. Operasional Radio Daerah
2. Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL)
3. Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi
4. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
5. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui website
6. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Menara Radio Langkisau
7. Pengembangan sumberdaya TIK Kabupaten
8. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Komunikasi dan Informatika

E. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1. Publikasi dan Promosi Daerah

F. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi

1. Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penyediaan Data Statistik

1. Sasaran yang telah ditetapkan tersebut terealisasi dengan baik karena ditunjang oleh program dan kegiatan yang terealisasi dengan tingkat capaian kinerja secara umum 100% kecuali sasaran peningkatan akses informasi komunikasi dengan capaian 0 %, dimana proses lelang gagal sebanyak 2 kali karena tidak mendapatkan penyedia yang sesuai dengan persyaratan perlu menjadi prioritas kerja untuk tahun kedepannya . Berdasarkan akuntabilitas keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan terealisasi sebesar 96,14 %.

Untuk kedepannya diharapkan alokasi anggaran dapat ditingkatkan bagi pembangunan komunikasi dan informatika karena pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah prioritas pembangunan daerah dimana



Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan lokal bangsa Indonesia seperti : keindahan alam Indonesia, iklim, sumber daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, dan penduduk Indonesia yang beragam etnik, budaya, agama dan bahasa, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing tinggi. Keunggulan khas Indonesia tersebut, perlu digali dan dikembangkan menjadi semacam National Information Database, yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan sektor--sektor yang lain dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan bangsa



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021.

1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”***

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan layanan e-Government

Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat. Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi masyarakat. Peningkatan e-gov dapat terlaksana dengan baik manakala



terdukung peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan infrastruktur jaringan serta mekanisme pengelolaan data yang terintegrasi. Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif dan saling mengisi.

2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial dan kemitraan profesi guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi. Pengembangan transparansi komunikasi dan informasi pada komunikasi sosial dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan KIM berbasis IT. Disamping itu juga dilakukan dengan penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra profesi dibidang komunikasi dan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk sinergitas informasi dan dokumentasi antara pemerintah atau badan publik kepada masyarakat dan antar masyarakat diperlukan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik PPID Kabupaten maupun PPID PD. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai sarana yang tumbuh berkembang dimasyarakat yaitu pelaksanaan dialog publik, pertunjukan rakyat, baliho, spanduk, leaflet dan sarana penyebarluasan informasi luar ruang lainnya.



2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kehandalan e-gov
- b. Meningkatkan penyebaran informasi.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional
2. Pengembangan Sistem Layanan Pemerintahan secara elektronik
3. Penyediaan sarana prasarana jaringan
4. Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan melalui aplikasi e-government pada layanan publik
5. Pengembangan Sistem Aplikasi Informatika yang terintegrasi
6. Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat
7. Meningkatkan Pengolahan informasi dan Dokumentasi melalui peningkatan layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website
8. Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik
9. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi secara mandiri
10. Meningkatkan peran lembaga komunikasi dan kemitraan media dalam penyebaran informasi.
11. Penyediaan Saluran Fiber Optick (FO)
12. Melaksanakan pengamanan informasi dan data pemerintah daerah.



3. Strategi Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, yaitu :

a. Strategi I yang digunakan untuk mencapai sasaran

- Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan sistem informasi terintegrasi

b. Strategi II yang digunakan untuk mencapai sasaran

- Meningkatkan informasi dan KIM, serta eksistensi PPID dan kemitraan profesi

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka perlu dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun anggaran. Perjanjian kinerja ini berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada Tabel dibawah ini:



Tabel 1.
Penetapan Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)
Meningkatkan layanan komunikasi dan informatika	1.	Persentase Nilai PPID	45 Perangkat Daerah	Program Pelayanan Informasi Publik Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi publik	98,006,500.00
	2.	Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Pesisir Selatan dan website Diskominfo	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website	133,177,300.00
	3.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina	15 Kelompok Informasi Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	62,991.000.00
	4.	Jumlah Operasional Radio/TV Kabupaten Pesisir Selatan	1 Radio Langkisau FM	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa) Kegiatan Operasional Radio Daerah	482,166,493,00



	5.	Persentase Penyebaran Informasi kepada Masyarakat	100 %	Kegiatan Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi	78,538,450.00
	6.	Jumlah Menara Radio Langkisau	1 Menara Radio	Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Menara Radio Langkisau	156,261,000.00
	7.	Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	100%	Kegiatan Publikasi dan Promosi Daerah	191,957,000.00
J U M L A H					971,913,943.00
Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi	1.	Jumlah Sumber Daya Manusia TIK Kabupaten	135 Orang (3 kali Bimtek @ 45 Org)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Kegiatan Pengembangan Sumberdaya TIK Kabupaten	161,972,000.00
	2.	Persentase peraturan dan perundang-undangan	100 %	Kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Komunikasi dan Informatika	58,471,000.00
	3.	Jumlah Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi	1 master plan	Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pembuatan Master Plan Teknologi informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pessel	301,892,000.00
	4.	Persentase Integrasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan	100%	Program Penyelenggaraan E Government Kegiatan Pembangunan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan	2,263,334,300.00
J U M L A H					2,785,669,300.00
Meningkatnya kualitas data pemerintah daerah	1.	Jumlah Data Statistik Daerah	200 buah buku PSDA	Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi	



				Kegiatan Penyediaan Data Statistik Daerah	71,237,000.00
J U M L A H					71,237,000.00
JUMLAH TOTAL					3,828,820,243.00

Pada tahun 2017, Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya PPID Kabupaten oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama dan Perangkat Daerah sebagai PPID pembantu .

Indikator kinerjanya :

- Jumlah PPID Utama sebanyak 1 Perangkat Daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika .
 - Jumlah PPID pembantu sebanyak 44 Perangkat Daerah.
2. Teruploadnya data/informasi pada website Pemkab Pesisir Selatan dan website Diskominfo.

Indikator kinerjanya :

- Jumlah berita sebanyak 1.440 berita yang terupload di website .
 - Jumlah artikel sebanyak 48 artikel yang terupload di website.
3. Teridentifikasinya Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator kinerjanya :

- Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina sebanyak 15 Kelompok Informasi Masyarakat
- Kelompok Informasi Masyarakat dari hasil seleksi yang di kirim ke Provinsi untuk dilaksanakan pemilihan media tradisional terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- Jumlah KIM terbaik dari hasil seleksi Provinsi selanjutnya akan dikirim ke tingkat nasional.



4. Meningkatnya Operasional Radio/TV Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator kinerjanya :

- Persentase peningkatan publikasi informasi daerah dengan system siaran radio dengan target 90%.

5. Mengefektifkan Penyebaran Informasi kepada Masyarakat.

Indikator kinerjanya :

- Persentase penyebaran informasi kepada masyarakat melalui mobil keliling

6. Terciptanya Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah

Indikator kinerjanya :

- Persentase penyebaran informasi pemerintah daerah melalui promosi daerah.

7. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi Kabupaten .

Indikator kinerjanya :

- Jumlah tenaga teknologi informasi komunikasi yang memiliki kemampuan yang baik.

8. Meningkatnya Integrasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator kinerjanya :

- Persentase terintegrasinya smart city untuk seluruh perangkat daerah se Kabupaten Pesisir Selatan.

9. Teridentifikasinya data statistik sektoral

- Jumlah data statistik sektoral untuk Kabupaten Pesisir Selatan lebih tervalidasi dengan baik.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2017	
			Target	Realisasi
(1)	(2)		(3)	(4)
Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	1.	Persentase Nilai PPID	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah
	2.	Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Pesisir Selatan dan website Diskominfo	100%	100%
	3.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina	15 Kelompok Informasi Masyarakat	15 Kelompok Informasi Masyarakat
	4.	Jumlah Operasional Radio/TV Kabupaten Pesisir Selatan	1 Radio Langkisau FM	1 Radio Langkisau FM
	5.	Persentase Penyebaran Informasi kepada Masyarakat	100%	100%
	6.	Jumlah Menara Radio Langkisau	1 Menara Radio	1 Menara Radio
	7.	Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi	1.	Jumlah Sumber Daya Manusia TIK Kabupaten	135 Orang (3 kali Bimtek @ 45 Org)	135 Orang (3 kali Bimtek @ 45 Org)
	2.	Persentase peraturan dan perundang-undangan	100%	100%
	3.	Jumlah Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi	1 master plan	1 master plan



	4.	Persentase Integrasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%
Meningkatnya kualitas data pemerintah daerah	1.	Jumlah Data Statistik Daerah	200 buah buku PSDA	200 buah buku PSDA

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Operasional Radio Daerah

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 482.166.493,00
- Keluaran
Terselenggaranya Operasional LPPL Radio Langkisau FM
- Hasil
Tersedianya Meubiler dan Peralatan Broadcasting Radio Set

b. Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (Santel)

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 50.864.000,00
- Keluaran
Terlaksananya pemeliharaan dan penunjang operasional peralatan persandian
- Hasil



Tersedianya peralatan persandian untuk pengumpulan dan penyebaran informasi.

c. Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 78.538.450,00

- Keluaran

Terlaksananya penyebaran informasi melalui mobil unit penerangan keliling, posko informasi dan pameran

- Hasil

Terpenuhinya penyebaran informasi pemerintah dan masyarakat melalui mobil unit penerangan keliling, posko informasi dan pameran.

d. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 62.991.000,00

- Keluaran

Terlaksananya pengembangan dan penyebaran informasi dan komunikasi melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) dan penilaian media tradisional.

- Hasil

Terbentuknya dan terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat serta penilaian media tradisional.

e. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 133.177.300,00

- Keluaran



Terlaksananya pengumpulan dan penyebaran informasi dan komunikasi melalui website pemerintah daerah.

- Hasil

Adanya informasi pemerintah dan masyarakat kabupaten pesisir selatan di website pemerintah daerah (www.pesisirselatankab.go.id)

f. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Menara Radio Langkisau

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 156.261.000,00

- Keluaran

Terlaksananya rehabilitasi dan perawatan Menara radio pemerintah langkisau

- Hasil

Adanya rehabilitasi dan perawatan Menara radio pemerintah daerah.

g. Pengembangan Sumberdaya TIK Kabupaten

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 161.972.000,00

- Keluaran

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi aparatur pemerintah.

- Hasil

Adanya peningkatan SDM aparatur dalam bidang TIK melalui pelatihan dan bimbingan teknis aparatur.

h. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Komunikasi dan Informatika.

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 58.471.000,00

- Keluaran



Terlaksananya pembuatan peraturan pemerintah tentang LPPL radio langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan

- Hasil

Tersedianya Peraturan Daerah tentang LPPL Radio Langkisau FM

2. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa

a. Publikasi dan Promosi Daerah

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 191.957.000,00

- Keluaran

Terlaksananya publikasi dan informasi pemerintah Kabupaten Pesisir melalui media elektronik

- Hasil

Adanya publikasi dan penyebaran informasi melalui media elektronik tentang Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi

a. Pengembangan Sumber Daya TIK Kabupaten

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 301.892.000,00

- Keluaran

Terlaksananya penyusunan perencanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Kabupaten Pesisir Selatan.

- Hasil

Tersedianya buku panduan penyusunan perencanaan TIK Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Penyediaan Data Statistik Daerah

- Masukan



Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 71.237.000,00

- Keluaran

Terlaksananya penyusunan data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Pesisir Selatan.

- Hasil

Tersedianya buku/laporan data dan informasi statistik sektoral pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Program Penyelenggaraan E-Government

a. Pembangunan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 2.263.334.300,00

- Keluaran

Terlaksananya pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika dan data server Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Hasil

Terkoneksinya semua perangkat daerah dan puskesmas dengan akses data informasi dan terpusatnya aplikasi, data dan informasi untuk penunjang pelayanan dan penyelenggaraan e government.

5. Program Pelayanan Informasi Publik

a. Operasional Pelayanan Informasi Publik

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 98.006.500,00

- Keluaran

Terlaksananya keterbukaan informasi public melalui lembaga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



- Hasil

Adanya pelayanan informasi publik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Komentar [EA1]:

3.1 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Analisa capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 disajikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government

Tujuannya :

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan secara elektronik
- Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut:

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu:

- Keterlambatan pelaksanaan pembangunan jaringan di kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada bulan Januari mundur pada bulan Juni Tahun 2017.

Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu keterlambatan pihak vendor (PT.Telkom) dalam menarik jaringan fiber optic ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan karena



memerlukan waktu yang lebih disebabkan geografis Kabupaten Pesisir Selatan

2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi

Tujuan :

- Meningkatnya penyebarluasan informasi
- Meningkatkan informasi dan KIM
- eksistensi PPID dan kemitraan profesi

Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu:
 - Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua, Pembinaan KIM sebanyak 15 Kecamatan, Pemilihan Media Tradisional di Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
 - Kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang disusun, PPID Utama adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dan perangkat daerah merupakan PPID Pembantu. PPID memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan terbentuknya Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Pesisir Selatan, terpublikasinya informasi melalui website serta terlayani permohonan informasi publik.
 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sudah mempublikasi informasi daerah melalui website pemerintah,



dan terlaksananya operasional Radio Langkisau FM yang membantu sebagian publikasi melalui media radio.

B. EVALUASI KINERJA SASARAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Komunikasi dan Informatika. Dengan pembentukan organisasi perangkat daerah baru tersebut program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PERIM.Kominfo/12/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

Evaluasi terhadap kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pembangunan e government berbasis smart city.

- **Kegiatan Pembangunan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran 90,00 %.**

Kegiatan Pembangunan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pembangunan infrastruktur dan mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini jaringan smart city sudah terintegrasi sebanyak 45 perangkat daerah dan 10 puskesmas.

- **Kegiatan Pengembangan Sumberdaya TIK Kabupaten dengan capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran 94,00 %**

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya TIK Kabupaten adalah terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi



aparatur pemerintah. Dari pelaksanaan kegiatan ini dilatih 90 (sembilan puluh) orang dari semua perangkat daerah.

- **Kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website dengan capaian kinerja 92 % dan realisasi anggaran 92 %**

Kegiatan ini adalah melaksanakan pengumpulan dan penyebaran informasi dan komunikasi melalui website pemerintah daerah (www.pesisirselatankab.go.id) yang bisa langsung diakses oleh masyarakat.

2. Tersedianya Informasi publik pemerintah daerah

- **Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dengan capaian kinerja 300 % dari target yang ditetapkan, dan realisasi anggaran 98.00%.**

Kegiatan ini untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Kecamatan untuk menyampaikan informasi pemerintah daerah. Kelompok Informasi Masyarakat merupakan wadah dan perpanjangan tangan pemerintah dalam penyampaian informasi pemerintah daerah. Melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, masyarakat KIM dapat menerapkannya dalam berbagai aktivitas perdagangan, pertanian, industri dan menghasilkan tambahan pendapatan dari aktivitas tersebut, informasi yang diperoleh dari berbagai media dan sumber lainnya, masyarakat dapat memperoleh informasi peluang-peluang usaha, permintaan pasar mengenai berbagai produk dan jasa, kemudian KIM dapat melakukan transaksi bisnis, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dikemas sedemikian rupa dalam bentuk bahan informasi (buku, bulletin, bahan audio visual)



Tabel 2.
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informas Masyarkat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Nagari	Nama Ke
1	Koto XI Tarusan	Pulau Karam	1. Sanggar Seni Elok Saiyo
			2. Sanggar Seni Tuah Sakato
			3. Sanggar Seni Atok Rumbio
2	Bayang	Tanjung Durian	1. Sanggar Batu Putih
			2. Saiyo Sakato
			3. Bayang Palito
3	IV Jurai	Painan Timur	1. Langkisau
		Painan	2. Sanggar San Alida
		Painan Selatan	3. Sanggar Andam Suri
		Painan Timur	4. Sanggar “ Yo Baiyo”
4	Batang Kapas	IV Koto Hilie	1. Gadih Nan Jombang
			2. Sanggar Gadih Basanai
		Taluak tigo sakato	3. Salendang Dunia Limau Sundai
5	Sutera	Koto Nan Tigo Selatan	1. Caidaiyani
6	Lengayang	Lakitan Utara / Kp.Pdg Marapalam	1. Sikambang Group
		Kampung Lubuak sariiek / kambang utara	2. Galombang Maimbau
			3. Pinang Sinama Tuah Sakato
		Kambang Utara	4. Nilo Nali Sikayan
7	Ranah Pesisir	Sungai Liku Labuhan	1. Timbulun Saiyo



			3. Palang Permai
8	Linggo Sari Baganti	Punggasan Utara	1. Alang Babega
9	Air Pura	Lubuk Betung	1. Pulau Rajo
			2. Puti Kumala Intan
			3. Darul Sakim Sakato
10	Pancung Soal	Tigo Sepakat	1. Sanggar Seni Rimbo Sarumpun
11	Basa Ampek Hulu Tapan	Dusun Baru	1. Silek Indo Jati
		Tanjung Pondok	2. Sasta Prima Fi
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pondok Binjai	1. Galombang Duo Baleh
13	Lunang	Sindang	1. Gandai Sindang Harapan Rumah Gadang Mandeh Rubiah
		Lunang Barat	2. Baringin Koto
		Kp Pasar Pagi Nag. Lunang Satu	3. Saiyo Sakato
14	Silaut	Sambungo	1. Asronggo Budoyo
		Silaut	2. Sanggar Seni Gandai
		Sei. Sarik	3. Gembong Srenggono
		Nagari Pasir Binjai	4. Tresno Budoyo
		Nagari Air Hitam	5. Taruna Budaya
		Lubuk Bunta	6. Tri Tunggal Budoyo
		Sungai Pulai	7. Singa Wana
		Nagari Lubuk Bunta	8. Krido Yakso
		Sungai Pulai	9. Turonggo Budoyo
		Sungai Sirah	10. Seni Tari Sekundang Merah
			11. Seni Tari Kreasi SMA 1 Silaut
		Durian Seribu	12. Seni Tari Nirmala
		Talang Binjai	13. Seni Tari Tor – Tor
		Sei. Serik	13. Gembong Srenggono

- Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik dengan capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran 95,93 %



Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik pada 45 perangkat daerah dengan melakukan sosialisasi pejabat pengelola informasi pemantauan dan dokumentasi pemerintah. PPID bertujuan untuk melaksanakan keterbukaan informasi public melalui lembaga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelayanan informasi public Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Perkembangan Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Nama OPD	Daftar Informasi Publik			Daftar Informasi Yang Dikecualikan	Keterangan
		Serta Merta	Berkala	Setiap saat		
1.	Sekretariat Daerah	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
2.	Sekretariat Dewan DPRD	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
3.	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
5.	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy



8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
9.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
10.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
11.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
12.	Dinas Perikanan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
13.	Dinas Pangan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
15.	Dinas Perhubungan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
16.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
17.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
18.	Dinas Pengelola Sumber Daya Air	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
20.	Informatika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
21.	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy



23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
24.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan pengembangan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
25.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
27.	Badan Pendapatan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
28.	Badan Penanggulangan Bencana	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
29.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
30.	RSUD M. Zein Painan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
31.	Kecamatan Koto XI Tarusan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
32.	Kecamatan Bayang	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
33.	Kecamatan Bayang Utara	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
34.	Kecamatan IV Jurai	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
35.	Kecamatan Batang Kapas	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
36.	Kecamatan Sutera	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
37.	Kecamatan Lengayang	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
38.	Kecamatan Ranah Pesisir	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy



39.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
40.	Kecamatan Pancung Soal	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
41.	Kecamatan Airpura	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
42.	Kecamatan Rahul	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
43.	Kecamatan BAB Tapan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
44.	Kecamatan Lunang	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
45.	Kecamatan Silaut	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy

- **Kegiatan Operasional Radio Daerah dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,51 %.**

Kegiatan ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana radio serta penyelenggaraan operasional radio Langkisau FM.

Radio Langkisau FM merupakan sarana informasi yang menyampaikan tentang pembangunan daerah. Radio Langkisau FM sudah memiliki sarana dan prasarana yang bisa melaksanakan operasional radio sesuai dengan standar nasional.

- **Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Menara Radio Langkisau dengan capaian 100 % dan realisasi anggaran 96 %.**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan operasional radio. Menara tersebut salah satunya sebagai tempat untuk penyiaran gelombang



yang akan ditangkap oleh penangkap gelombang seperti radio, untuk itu diperlukan pemeliharaan terhadap menara radio Langkisau FM.

- **Kegiatan Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 92,90 %.**

Kegiatan ini adalah melaksanakan penyampaian informasi pemerintah daerah melalui Mobil Penerangan Keliling, pelaksanaan pameran dan mendirikan posko informasi yang akan menyampaikan informasi pemerintah daerah.

3. Tersedianya Data Statistik Sektoral

- **Kegiatan Penyediaan Data Statistik Daerah dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,10 %.**

Kegiatan ini adalah memfasilitasi pengumpulan data pemerintah daerah dan melaksanakan pencetakan buku Pesisir Selatan Dalam Angka yang nantinya akan berguna bagi perangkat daerah dalam penggunaan data pemerintah daerah.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja pembangunan komunikasi dan informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 5.572.210.843,- dan terealisasi Rp. 4.863.425.500,- atau tingkat penyerapannya yaitu 89,90 %, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
Capaian Keuangan Sasaran

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan layanan komunikasi dan	1.	Persentase Nilai PPID	45 Perangkat Daerah	Program Pelayanan Informasi Publik		



informatika				Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi publik	98,006,500.00	93.056.500.00
	2.	Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Pesisir Selatan dan website Diskominfo	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website	133,177,300.00	123.000.000.00
	3.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina	15 Kelompok Informasi Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	62,991.000.00	61.901.000.00
	4.	Jumlah Operasional Radio/TV Kabupaten Pesisir Selatan	1 Radio Langkisau FM	Kegiatan Operasional Radio Daerah	482,166,493,00	477.066.493.00
	5.	Persentase Penyebaran Informasi kepada Masyarakat	100 %	Kegiatan Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi	78,538,450.00	72.052.603.00
	6.	Jumlah Menara Radio Langkisau	1 Menara Radio	Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Menara Radio Langkisau	156,261,000.00	149.576.000.00
	7.	Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	100%	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Kegiatan Publikasi dan Promosi Daerah	191,957,000.00	184.585.500.00
J U M L A H					971,913,943.00	1.161.238.096.00
Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi	1.	Jumlah Sumber Daya Manusia TIK Kabupaten	135 Orang (3 kali Bimtek @ 45 Org)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa		



				Kegiatan Pengembangan Sumberdaya TIK Kabupaten	161,972,000.00	152.765.100.00
	2.	Persentase peraturan dan perundang-undangan	100 %	Kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Komunikasi dan Informatika	58,471,000.00	56.278.900.00
	3.	Jumlah Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi	1 master plan	Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pembuatan Master Plan Teknologi informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pessel	301,892,000.00	374.000.00
	4.	Persentase Integrasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan	100%	Program Penyelenggaraan E Government Kegiatan Pembangunan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan	2,263,334,300.00	2.042.005.054.00
J U M L A H					2,785,669,300.00	2.251.864.054.00
Meningkatnya kualitas data pemerintah daerah	1.	Jumlah Data Statistik Daerah	200 buah buku PSDA	Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi Kegiatan Penyediaan Data Statistik Daerah	71,237,000.00	69.000.000.00
J U M L A H					71,237,000.00	69.000.000.00
JUMLAH TOTAL					3,828,820,243.00	3.482.102.150.00



BAB IV

PENUTUP

Dari data yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan target yang telah direncanakan pada tahun 2017 terealisasi 100 %.
2. Tingkat capaian kinerja sasaran tahun 2017 sesuai dengan target yang telah direncanakan terealisasi 100 % kecuali Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pessel 0 %. Hal ini disebabkan proses lelang gagal sebanyak 2 kali karena tidak mendapatkan penyedia yg sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Tercapainya kinerja sasaran dan kegiatan dengan baik disebabkan antara lain :
 - a. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah pegawai yang dimiliki cukup banyak dengan SDM yang dimiliki pada umumnya Sarjana.
 - b. Program – program Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan pada tahun 2017, telah mencapai tujuan dan sasaran terutama Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan E Government yang bekerja dengan optimal sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berjalan semestinya.
4. Meskipun kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan optimal namun kendala – kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas masih banyak, antara lain :
 - a. Sarana dan prasarana penunjang operasional masih minim jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada.



- b. Biaya operasional belum memadai karena pada saat penyusunan anggaran 2017 belum disusun secara rasional.
 - c. Masih minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan e government sehingga belum sepenuhnya perangkat daerah dan nagari-nagari bisa terintegrasi dengan baik.
5. Untuk kedepannya diharapkan alokasi anggaran dapat ditingkatkan bagi pembangunan Komunikasi dan Informatika periode RPJMD 2016-2021.



[illegible]

LAMPIRAN 1.

**PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016-2021**

[illegible]

3	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI													
	- Pekan Nasional Tani	kali/thn	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	50.00
	Penyusunan Programa Penyuluhan													
	- Tingkat Nagari	nagari	76	76	76	76	182	182	76	182	-	182	182	105.07
	- Tingkat Kecamatan	Kec	12	12	12	12	15	15	12	12	-	15	15	81.82
	- Tingkat Kabupaten	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	80.00
4	DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
	- Pengembangan Desa Mandiri Pangan	desa	10	2	2	2	-	-	3	1	-	-	1	83.33
	- Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	unit	10	4	5	5	4	-	4	-	5	4	-	72.22
	- Penanganan Daerah Rawan Pangan	desa	5	4	4	4	-	-	5	4	2	1	8	166.67
	- Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	60.00
	- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	66.67
	- Data Kemiskinan dan Rawan Pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
	- Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM	Gapoktan	3	1	5	5	1	1	1	1	-	1	-	23.08
	- Panel dan Pemantauan Harga	kec	12	12	12	12	-	15	1	1	1	3	15	41.18
	- Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional	kec	-	-	12	12	2	-	-	3	2	4	15	92.31
	- Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	desa	10	-	4	4	4	4	20	20	20	13	20	581.25
	- Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	kec	12	12	12	12	15	15	12	12	15	15	15	104.55

[illegible]

LAMPIRAN 2.

**PENETAPAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN : 2017

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)		Target (3)	Program / Kegiatan (4)	Anggaran (5)
Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	1.	Persentase PPID	45 Perangkat Daerah	Program Pelayanan Informasi Publik Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik	98.006.500.00
	2.	Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemda Kab.Pesisir Selatan website Diskominfo	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pengumpulan dan penyebaran Informasi Daerah melalui website	133.177.300.00
	3.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina	15 kelompok informasi masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	62.991.000.00
	4.	Jumlah operasional Radio/TV Kabupaten Pesisir Selatan	1 Radio Langkisau FM	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Operasional Radio Daerah	482.166.493,00
	5	Persentase Penyebaran Informasi kepada masyarakat	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Operasional Penerangan Keliling,pameran dan posko informasi	78.538.450.00
	6	Jumlah menara Radio Langkisau	1 menara radio	Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi menara radio langkisau	156.261.000.00
	7	Persentase Penyebaran informasi pemerintah daerah	100%	Kegiatan Publikasi dan Promosi Daerah	191.957.000.00
J U M L A H					1,046,836,743.00
Meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi	1.	Jumlah sumber daya manusia TIK Kabupaten	135 oran (3 kali Bimtek @ 45 org)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pengembangan Sumber daya TIK Kabupaten	161,972,000.00
	2.	Persentase Peraturan Perundang-undangan	100%	PrProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pembuatan peraturan perundang-undangan kegiatan komunikasi dan informasi	58.471,000.00

JUMLAH	220,443,000.00
--------	----------------

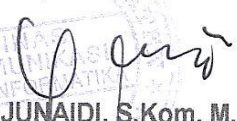
Meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi	3	Jumlah Master Plan Teknologi Informasi komunikasi	100%	Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan informasi Kegiatan Pembuatan Master plan Teknologi Informasi komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan	301,892,000.00
	2.	Persentase Integrasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan	100%	Program Penyelenggaraan E Government Kegiatan Pembangunan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan	2,263,334,300.00
J U M L A H					2,565,226,300.00
Meningkatnya kualitas data pemerintah daerah	1.	Jumlah Data Statistik	200 buah buku PSDA	Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi Kegiatan Penyediaan Data Statistik Daerah	71,237,000.00
J U M L A H					71,237,000.00
J U M L A H T O T A L					3,903,743,043.00

Jumlah Total Anggaran

Rp. 3,903,743,043.00

PAINAN, JANUARI 2018

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan


JUNAIDI, S.Kom, M.E
Pembina Tk.I /IV(b)
NIP. 19700609 199703 1 002

LAMPIRAN 3.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Meningkatkan layanan komunikasi dan informatika	1.	Persentase nilai PPID	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100.00
	2.	Persentase upload data/informasi pada website Pemkab Pesisir Selatan dan website Diskominfo	100%	100%	100.00
	3.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina	15 Kelompok Informasi masyarakat	15 Kelompok Informasi masyarakat	100.00
	4	Jumlah Operasional Radio/TV Kabupaten Pesisir Selatan	1 Radio Langkisau FM	1 Radio Langkisau FM	100.00
	5	Persentase Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	100.00
	6	Jumlah Menara radio Langkisau	1 Menara Radio	1 Menara radio	100.00
	7	Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	100%	100%	100.00
Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi	1.	Jumlah Sumber Daya Manusia TIK Kabupaten	135 Orang (3 kali Bimtek @ 45 orang)	135 Orang (3 kali Bimtek @ 45 orang)	100.00
	2	Persentase Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100.00
	3	Jumlah Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi	1 master plan	1 master plan	100.00
	4	Persentase Integrasi smart city Kabupaten Pesisir Selatan	15 Kecamatan selama 52 Minggu	15 Kecamatan selama 52 Minggu	100.00
Meningkatnya kualitas data pemerintah daerah	1.	Jumlah Data Statistik Daerah	100 buah buku PSDA	100 buah buku PSDA	100.00

Jumlah Anggaran Kegiatan 2017 : Rp. 3,127,230,200,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 2 : Rp. 3,006,572,066.00
Persentase : 96.14%

PAINAN, JANUARI 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JUNAIDI,S.Kom,ME
Nip. 19700609 199703 1 002

**DAFTAR PENGHARGAAN YANG DIRAIH
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Photo	Penghargaan	Tahun Penghargaan
1		Penghargaan Implementasi Smart City Nusantara Tahun 2017	2017

Painan, Januari 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JUNAIDI,S.Kom,ME
NIP. 19700609 199703 1 002

**JENIS-JENIS PENGHARGAAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	JENIS PENGHARGAAN	KRITERIA	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Penghargaan Implementasi Smart City Nusantara Tahun 2017	Pemerintah kota yang telah mengimplementasikan Smart City Nusantara	Penghargaan yang diberikan oleh PT.Telkom untuk Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Smart City.Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten tercepat yang melaksanakan smart city.

Painan, Januari 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JUNAIDI,S.Kom,ME
NIP. 19700609 199703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (information of technology).

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak



lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 86 tahun 2017, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2017.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 33 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Gambaran Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Lkj Dinas Komunikasi dan Informatika 2017 nomor 33 tahun 2016, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :



1.4.1 Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 bahwa: “Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Komunikasi dan Informatika”.

1.4.2 Fungsi

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informasi;
5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi dan Informasi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Pesisir Selatan sesuai struktur organisasi dan tata kerja terdiri dari 1 unit eselon II, 3 unit eselon III yang terdiri dari 1 sekretariat dan 2 Kepala Bidang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Penyelenggaraan E Government, terdiri dari:
 - a. Seksi Desiminasi Infromasi dan Pemberdayaan Telematika
 - b. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi
 - c. Seksi Pelayanan E Government
4. Bidang Statistik Persandian dan Pelayan Informasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan, Pelayan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Seksi Persandian
 - c. Seksi Statistik

A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

b. Sekretaris



1. Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang
 2. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu Membantu Sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan, mengolah dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi Membantu Sekretaris merencanakan, menyusun, mengolah rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang – bidang yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu

1. Bidang Penyelenggaraan E Government

Bidang Penyelenggaraan E Government mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Penyelenggaraan e- Government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan dan ketentuan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a) Seksi Pelayanan E Government



Seksi Pelayanan E Government mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan kegiatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi e-government

b) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Pengembangan dan Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengembangan infrastruktur dan teknologi.

c) Seksi Desiminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika

Seksi Pengembangan dan Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaksanakan dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kegiatan diseminasi informasi dan pemberdayaan telematika

2. Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi :

Bidang Statistik

dan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a) Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengumpulkan data urusan statistik sektoral.



b) Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah terkait dengan persandian.

c) Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengawasi urusan pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi publik

